

**TESIS**

**PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP UNTUK KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH  
DI KOTA BUKITTINGGI**



**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Hukum**

**OLEH :**

**NAMA : FERDY NUGRAHA  
NIM : 2120113019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

# **Penetapan Batas Bidang Tanah Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kota Bukittinggi**

Ferdy Nugraha, 2120113019, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana,  
Fakultas Hukum Universitas Andalas

## **Abstrak**

Penetapan batas bidang tanah merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Namun dalam praktiknya, penetapan batas seringkali menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait kesepakatan batas antar pemilik bidang tanah yang berbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penetapan batas bidang tanah dalam PTSL di Kota Bukittinggi, serta implikasinya terhadap kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode empiris deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas pertanahan, peserta PTSL, dan tokoh masyarakat, serta observasi terhadap pelaksanaan penetapan batas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan batas masih menghadapi kendala dalam penerapan asas *contradictoire delimitatie*, terutama ketika pemilik bidang berbatasan tidak diketahui atau tidak dapat hadir. Dalam kondisi tersebut, batas ditetapkan secara sepihak dengan dukungan saksi dan dokumentasi, yang berimplikasi pada lemahnya jaminan kepastian hukum. Meskipun demikian, keberhasilan PTSL dalam mendata seluruh bidang tanah tetap memberikan manfaat dalam hal tersedianya informasi pertanahan yang lebih komprehensif dan tertib secara administratif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tujuan utama pendaftaran tanah, yaitu kepastian hukum, belum sepenuhnya tercapai, namun dapat diwujudkan secara bertahap dengan terlebih dahulu mengoptimalkan penyediaan informasi pertanahan. Penulis menyarankan agar dilakukan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas petugas lapangan.

**Kata kunci:** penetapan batas, Pendaftaran Tanah, kepastian hukum.

# **Boundary Determination of Land Parcels in the Implementation of Systematic Complete Land Registration for Legal Certainty of Land Rights in Bukittinggi City**

Ferdy Nugraha, 2120113019, Master of Law Study Program Postgraduate Program,  
Faculty of Law, Andalas University

## **Abstract**

The determination of land parcel boundaries is a crucial stage in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program, aimed at ensuring legal certainty of land rights. However, in practice, boundary determination often faces various challenges, particularly in reaching agreement between adjacent landowners. This study aims to analyze the boundary determination process within the PTSL program in the City of Bukittinggi and its implications for the legal certainty of land rights. This research employs a descriptive empirical method using a qualitative approach. Data were collected through interviews with land office officials, PTSL participants, and local community leaders, as well as field observations. The findings show that the implementation of boundary determination continues to face obstacles, especially regarding the application of the *contradictoire delimitatie* principle, where neighboring landowners are absent or unidentified. In such cases, boundaries are established unilaterally with support from local witnesses and documentation, which weakens legal certainty. Nevertheless, the overall success of PTSL in registering all land parcels contributes significantly to the availability of comprehensive land information and administrative order. The study concludes that the primary goal of land registration—legal certainty—has not yet been fully achieved but can be realized progressively by first optimizing land information systems. It is recommended to strengthen community participation, enhance field personnel capacity.

**Keywords:** boundary determination, land registration, legal certainty.

